



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN DI BEI

Vivie Nurhidayah

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: nurhidayahvivie75@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 8 November 2019

Tgl. Diterima : 18 Februari 2020

Tersedia Online : 31 Maret 2020

Keywords:

Komisaris independen,
kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, komite
audit, dewan direksi, kinerja
keuangan.

ABSTRAK/ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan *good corporate governance* dengan kinerja keuangan pada Perbankan di BEI. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan Perbankan di BEI. Adapun metode analisis yang digunakan adalah uji deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linieritas, serta uji regresi berganda. Hasilnya bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan direksi, dapat meningkatkan kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan salah satu acuan utama dalam mengukur baik atau tidaknya suatu perusahaan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam mengukur kinerja keuangan

operasional suatu perusahaan dengan cara menanamkan saham modal dan pastinya mengharapkan adanya keuntungan yang besar atas investasi tersebut. Oleh sebab itu dalam menjalankan usahanya, selain dituntut untuk meningkatkan laba, perusahaan juga harus dapat mengoptimalkan

internal dan perusahaan tersebut dengan melihat laporan keuangannya, sedangkan dari sisi eksternal yaitu dengan nilai perusahaan dengan menghitung kinerja keuangan suatu perusahaan Salsabila dan Muhammad Saifi (2017).

Peran investor turut memberikan andil dalam mendanai kegiatan

ya terhindar dari kesulitan finansial, dengan begitu dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan secara terus menerus (Rumini, dkk., 2019).

The Organization For Economic Corporation And Development (OECD) mengungkapkan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang digunakan dalam mengendalikan dan

mengarahkan kegiatan usaha suatu perusahaan, termasuk dalam mengatur pemisahan tugas, hak dan kewajiban mereka yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota, dan para pemangku kepentingan lainnya (Purwantini, 2008 dalam Purweni dan Nik 2012).

Menurut (Effendi, 2009:127 dalam Purweni dan Nik 2012) perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance* akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, serta kurang dihargai oleh masyarakat, serta dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan dari hasil penelitian, perusahaan tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sehingga perusahaan tersebut dapat kehilangan peluang untuk keberlangsungan usahanya. Namun sebaliknya dengan perusahaan menerapkan *good corporate governance* dapat menciptakan nilai bagi masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah, serta lebih diminati investor sehingga berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.

Beberapa waktu yang lalu munculnya dua skandal kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha, yaitu kasus Enron dan Worldcom. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam praktik bisnis yang melanggar etika ternyata terjadi di negara yang sangat mengagumkan *prinsip good corporate governance*. Skandal ini terjadi akibat aspek moral yang ada didalam *good corporate governance*, terutama prinsip transparansi, dan pengungkapan serta prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaannya. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari penerapan terhadap *good corporate governance* yang hanya mengandalkan kepercayaan pada

manusia saja sebagai pelaku bisnis yang mengesampingkan aspek dari dimensi moral bersumber dari ajaran agama. Sebagus apapun sistem yang berlaku dalam perusahaan, apabila manajemennya berperilaku menyimpang dan melanggar dari etika bisnis maka dapat terjadi kecurangan yang dimana hal tersebut akan sangat merugikan untuk perusahaan serta dapat berakhir kebangkrutan (Effendi, 2009:127 dalam Purweni dan Nik 2012).

Perhatian terhadap penerapan *corporate governance* di Indonesia muncul akibat terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1999 sehingga berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis tersebut terjadi karena banyaknya perusahaan yang belum menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten, khususnya belum menerapkan etika bisnis (Yunengsih, dkk., 2018). Kasus PT. Kimia Farma Tbk. Diketahui memanipulasi laporan keuangan dengan meningkatkan laba hingga Rp.32,7 milyar. PT. Indofarma melakukan praktik *earning management* dengan menyajikan overstated laba bersih sebesar Rp.28,870 milyar, dampak dari penilaian barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut mengalami penurunan. Dalam penerapan *corporate governance* berfungsi dalam memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan (Januarti, 2008) dalam Nova Fretty dan Septian (2014). Mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memprediksi beberapa variabel yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peranan dewan komisaris sehingga

menciptakan *good corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Weindy (2018) yang menunjukkan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Andri Veno (2015) dimana komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dengan adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi. Serta adanya monitoring yang efektif, dipercaya dan dapat meningkatkan meningkatkan kinerja perusahaan, oleh karena itu kepercayaan publik terhadap perusahaan juga meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Movie Rahmatika (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian Purweni dan Nik (2012) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan manajerial diantaranya pemegang saham yang mempunyai kedudukan dalam suatu perusahaan sebagai kreditur ataupun sebagai dewan komisaris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila (2019) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Weindy (2018) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Komite audit mempunyai peranan yang penting dalam hal memelihara kredibilitas laporan keuangan seperti dilaksanakannya *good corporate*

governance. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Muhammad Saifi (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian Yulia dan P. Basuki (2014) bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dewan direksi yang melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mira dan Meina (2019) menjelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian Delfalina dan Aminar (2016) bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dari uraian di atas berkaitan dengan kinerja keuangan yang semakin mengalami perubahan. Penelitian ini akan dilakukan pada laporan keuangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan direksi. Ada pengaruh dengan kinerja keuangan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dapat didefinisikan sebagai kontrak diantara satu atau lebih orang (disebut *owners* atau pemegang saham) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus atau manajemen) yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berbatas nama kan pemilik. Tanggungjawab tersebut termasuk

pengendalian wewenang dalam mengambil keputusan. Dalam hal tersebut manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya oleh pemilik diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya. Serta pada umumnya pemilik mempunyai tujuan yang sifatnya jangka panjang, sebaliknya dengan sikap manajemen yang mempunyai tujuan jangka pendek sehingga terkadang manajemen cenderung meningkatkan laba jangka pendeknya dengan mengambil keuntungan jangka panjang. Untuk mengurangi kemungkinan yang terjadi, pemilik menetapkan insentif yang sesuai untuk manajemen, dengan cara membayar biaya monitoring dalam bentuk gaji Andri Venro, (2015).

Menurut (Jensen dan Meckling 1976 dalam Andri Venro, 2015) yang menggambarkan adanya hubungan kontak antara agen (manajemen) dengan pemilik (prinsipal). Prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas prinsipal, dan agen merupakan pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal untuk mengurus perusahaan. Oleh sebab itu, agen yang mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Ketidak seimbangan informasi ini biasa disebut *information asymmetries*.

Menurut (Darmawati,dkk,2005 dalam Andri Venro, 2015) ada tiga asumsi yang mendasari teori keagenan yaitu terkait dengan sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi.

1. Dalam asumsi sifat manusia menitik beratkan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional, serta tidak menyukai adanya resiko.
2. Dalam asumsi keorganisasian menekankan dengan adanya konflik diantara anggota organisasi, efisiensi

sebagai kriteria efektivitas, serta terdapat adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

3. Asumsi informasi mengungkapkan bahwa informasi sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan *corporate governance* sebagai bagian dari efektivitas mekanisme untuk meminimalisir konflik keagenan.

Dengan penekanan khusus pada mekanisme legal untuk mencegah tindakan ekspropriasi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang mencakup serangkaian hubungan diantara dewan komisaris, manajemen perusahaan para pemegang saham, dan juga pemangku kepentingan lainnya.

Good Corporate Governance

Menurut Sutendi (2011:1) dalam Hasbi, Ichi, dan Indah (2019) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komosaris dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai dari pemegang saham dalam waktu panjang dengan tetap memperhatikan keberhasilan pemegang saham yang lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sedangkan menurut Cadbury (2011:1) *Good Corporate Governance* merupakan mengacu dan mengawasi perusahaan sehingga tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

Selain dari aspek penting diatas *good corporate governance* juga memiliki

prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance*. Disini juga secara umum terdapat lima prinsip dasar diantaranya: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Menurut (Daniri, 2005:9 dalam Salsabila dan Muhammad Saifi, 2017) prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (transparansi) untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan materil serta dapat dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (keterbukaan) dimana perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban) perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. *Independency* (independensi) perusahaan harus dikelola secara independen sehingga semua organ perusahaan tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya serta tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
5. *Fairness* (keadilan) perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya mengacu pada asas kewajaran dan kesetaraan.

Elemen-elemen dalam mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja merupakan suatu pencapaian dari suatu tujuan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dari perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan secara terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama pada kemajuan tujuan yang sebelumnya (Andri Veno, 2015).

Menurut (Jumingan, 2006:240 dalam Maria, (2013) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan suatu perusahaan yaitu *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, serta memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode tertentu. Pengukuran dalam kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang semestinya. Dari semua ini diharapkan dapat mendorong timbulnya motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian agar bekerja lebih efektif dan efisien (Mulyadi, 2001:420 dalam Maria, 2013).

Sedangkan menurut (Syamsuddin, 2009:63 dalam Salsabila dan Muhammad Saifi, 2017). *Return On Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya ketika memperoleh laba, sehingga dapat dikatakan bila ROA semakin tinggi maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola asetnya yang mereka miliki untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak. Aset merupakan keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang diubah

oleh perusahaan menjadi aktiva, untuk keberlangsungan hidup suatu perusahaan. ROA yang telah diketahui digunakan perusahaan untuk menilai efisiensi aktivitasnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba.

PEMBAHASAN

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan dengan manajemen, maupun anggota dewan komisaris yang lainnya serta sebagai pemegang saham pengendali, dan juga bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya sehingga dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak secara independen atau pun bertindak untuk kepentingan perusahaan. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006 dalam Maria, 2013)

Yang berasal diluar perusahaan atau pun yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah ketika terjadi konflik serta memberikan nasihat terhadap manajemen merupakan proporsi dewan komisaris. Komisaris independen adalah posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi mentoring agar tercipta *good corporate governance* dalam perusahaan (Farma dan Jense, 1983 dalam Andri Veno, 2015).

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peranan dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Muhammad Saifi (2017), Yulia dan P. Basuki (2014) yang menunjukkan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Andri Veno (2015) dimana komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Oleh karena itu dengan proporsi komisaris independen yang tinggi dalam perusahaan akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena tidak terafiliasi oleh perusahaan dalam bentuk mentoring agar tercipta *good corporate governance* dalam perusahaan dan juga sebagai penengah ketika ada konflik serta memberikan nasihat terhadap manajemen.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner et.al, 2003). Menurut Helen Short, Hao Zhang dan Kevin Keasey (2002) dalam Defalina dan Aminar (2016), mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan yang dimiliki lembaga yang memiliki persentase dan ekuitas sebesar 5% atau lebih dari modal awal pada tahun yang bersangkutan.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak investor institusional dari berbagai bidang perusahaan dan lembaga keuangan. Pada perusahaan publik di Indonesia, mayoritas kepemilikan institusional diperoleh dari jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh kepemilikan institusional (Beiner et.al, 2003 dalam Defalina dan Aminar 2016).

Variabel ini diukur berdasarkan indikator jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Movie Rahmatika (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian Purweni dan Nik (2012) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Oleh karena itu dengan adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi. Serta adanya monitoring yang efektif, dipercaya dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, serta kepercayaan publik terhadap perusahaan juga meningkat.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen seperti manajer, dewan komisaris, dewan direksi dalam suatu perusahaan. Dengan keberadaan kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan serta dapat dianggap sebagai kegiatan monitoring dalam perusahaan karena manajer tersebut sebagai pemegang saham juga sebagai pengawas perusahaan yang menginginkan laporan yang dibuat dapat memberikan informasi yang relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian informasi yang diberikan oleh manajer kepada pemegang saham akan lebih objektif dan tidak memiliki perbedaan informasi (Yuyun, Ichi, dan Asep, 2018).

Kay (1992) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan dari badan usaha dari pihak eksekutif sehingga membuat eksekutif yang melakukan akuisisi saham badan usaha Ernawati dan Puspitasari, (2010) dalam Yulia dan P. Basuki (2014).

Kepemilikan manajerial meliputi pemegang saham yang mempunyai kedudukan dalam perusahaan sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purweni dan Nik (2012) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Yulia dan P. Basuki (2014) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Oleh karena itu dengan proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi dapat monitoring perusahaan karena manajer tersebut sebagai pemegang saham juga sebagai pengawas perusahaan yang menginginkan laporan yang dibuat dapat memberikan informasi yang relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh pihak lain yang dibentuk dewan komisaris, tugasnya adalah memperkuat dan membantu fungsi dari dewan komisaris saat melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen risiko, penerapan corporate governance. Bapepam melalui surat edaran No. 03/PM/2000 yang diajukan kepada direksi dan perusahaan publik yang mewajibkan dibentuknya komite audit (Maria, 2013)

Peraturan terkait jumlah komite audit bagi emiten dari perusahaan publik diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 terkait pembentukan pelaksanaan kinerja audit. Dalam membuat komite audit yang efektif dalam

pengendalian dan pemantauan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan, komite audit harus mempunyai anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawabnya, pedoman dalam pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, dan diketahui oleh komisaris independen dengan dua orang eksternal yang independen kepada perusahaan dan menguasai, memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit (Maria, 2013).

Komite audit mempunyai peranan yang penting dalam hal memelihara kredibilitas laporan keuangan seperti dilaksanakannya *good corporate governance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Muhammad Saifi (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian Yulia dan P. Basuki (2014) bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Oleh karena itu dengan adanya komite audit perusahaan bisa lebih transparan dan juga reliabel terhadap kinerjanya. Serta dengan pengawasan yang dilakukan komite audit atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, penerapan corporate governance sehingga dapat mendorong untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

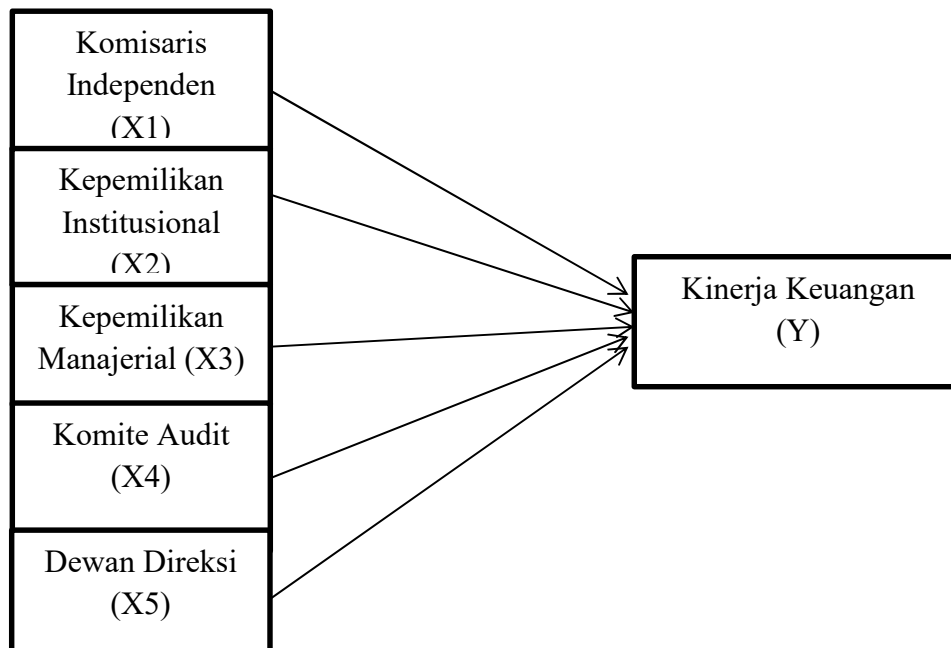
Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi merupakan dewan yang dipilih oleh pemegang saham, yang bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan, dengan tujuan kepentingan para pemegang saham. Dewan direksi dalam perusahaan sangatlah penting untuk mencapai komunikasi yang efektif antara anggota dewan. Komunikasi yang baik akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam perusahaan agar dapat mengurangi perilaku menyimpang yang dapat dilakukan oleh manajemen (Defalina dan Aminar 2016).

Dewan direksi yang melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuannya dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mira dan Meina (2019) menjelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dapat dijelaskan oleh penelitian Delfalina dan Aminar (2016) bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Oleh karena itu dengan adanya dewan direksi dalam perusahaan dapat mengawasi pekerjaan dari manajemen dalam mengelola perusahaan dengan tujuan para pemegang saham. Serta tercapai komunikasi yang efektif antar anggota dewan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah komisaris independen (X_1), kepemilikan institusional (X_2), kepemilikan manajerial (X_3), dan komite audit (X_4), dewan direksi (X_5) sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja keuangan (Y).

KESIMPULAN

1. Proporsi komisaris independen dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan.
2. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja pada keuangan perusahaan.
3. Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan.
4. Komite audit dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan.
5. Dewan direksi dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Istri dan Komang. 2017. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Pada Manajemen Laba*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18, No. 1, Hal. 443-470.
- Andri Venno. 2015. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 19, No. 1, Hal. 95-112.
- Audita Setiawan, 2016. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jurnal SIKAP Vol. 1, No. 1 (2016).

- Delfalina dan Aninar. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP (2015).
- Gabriel dan Fidelis, 2013. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei the Indonesia Institute Perception Governance (IICG) Periode 2008-2011*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2, No. 1 (2013).
- Hasbi, dkk, 2019. *Peran Corporate Governance Dalam Mengurangi Dampak Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*. Journal Accounting and Management, Vol. 1, No. 1.
- Maria Fransisca, 2018. *Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan*. Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 1.
- Melia Agustina. 2015. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan*. Business Accounting, Vol. 3, No. 1, Hal. 223-232.
- Mila Nilayanti. 2019. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26, Hal. 906-936.
- Mira dan Meina, 2019. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 7, No. 1.
- Movie Rahmatika. 2018. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 16, No. 1.
- Purweni dan Nik. 2012. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Hal. 94-102.
- Richy Sugiono. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Surabaya: Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Rumini, R., Sugiharto, B., & Kurniawan, A. (2019). THE MODERATING EFFECT OF COMPETITIVE STRATEGIES ON INTELLECTUAL CAPITAL AND COMPANY VALUE IN BANKING COMPANIES. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(1), 92-105.

- Salsabila dan Muhammad Saifi, 2017. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Keuangan Dan Nilai Perusahaan*. Malang: Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 50, No. 3.
- Wiendy Indriati. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).
- Yulia dan P. Basuki. 2014. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*. Diponegoro Jurnal Of Accounting, Vol. 3, No. 3, Hal. 1-15.
- Yunengsih, Y., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, Kepemilikan Manajerial Dan Reputasi Auditor Terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 2(2), 31-52.